

BAB II KAJIAN TEORITIK

A. Membangun Kemandirian Ekonomi

Dalam teori pembangunan dikatakan bahwa sesungguhnya pembangunan merupakan sebuah upaya yang dapat membawa masyarakat mengikuti sebuah proses untuk mencapai kehidupan yang sebelumnya dianggap tidak baik, atupun kurang baik, menjadi sebuah kondisi yang lebih baik. Meskipun demikian kondisi masyarakat yang lebih baik adalah sebuah kondisi yang tidak dapat ditunggalkan. Kondisi ini mempunyai banyak ukuran dan kriteria yang berbeda. Akibatnya, ukuran kondisi yang lebih baik bagi seseorang belum tentu baik menurut orang lain, bahkan dapat saja menjadi kondisi yang lebih buruk. Contohnya Pemerintah beranggapan kondisi yang lebih baik bagi bangsanya adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah berusaha membuka sebanyak mungkin wilayah kantong-kantong pertumbuhan ekonomi yang dapat mendukung tujuan tersebut. Oleh karena itu, agar kinerja administrator publik dapat betul-betul mengarah pada pencapaian upaya perbaikan kehidupan masyarakatnya, maka teori-teori pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan manusia dari beragam sudut pandang perlu tersedia.¹

Tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan.

¹ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, dan Kebijakan)*, Edisi I, (Yogyakarta: UPP AMP YKIN, 1997), 116.

Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Terkait dengan program pembangunan, bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri. Berkaitan dengan hal ini, Sumodiningrat (2000) menjelaskan bahwa keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandiriannya dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama

pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.²

B. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan pada hakekatnya adalah upaya pemberian daya atau peningkatan keberdayaan. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Kemandirian buka berarti mampu hidup sendiri tetapi mandiri dalam pengambilan keputusan, yaitu memiliki kemampuan untuk memilih dan keberanian menolak segala bentuk bantuan dan atau kerjasama yang tidak menguntungkan.

Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/*upgrade utilitas* dari obyek yang diberdayakan. Karena itu pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk terus menerus meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam pengertian sehari-hari,

² Sumudiningrat, G., *Visi dan Misi pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*, (Yogyakarta : IDEA, 2000), 82.

pemberdayaan masyarakat selalu dikonotasikan sebagai pemberdayaan masyarakat kelas bawah (*grassroots*) yang umumnya dinilai tidak berdaya.

Pada dasarnya islam merupakan agama pemberdayaan. Dalam pandangan islam, pemberdayaan itu dan merupakan gerakan yang tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma islam itu sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan. Istilah pemberdayaan dalam bahasa asing adalah “*empowerment*”. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Sedangkan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya disamakan dengan pengembangan.³ Amrullah Ahmad menyatakan bahwa pengembangan masyarakat islam adalah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah Ummah dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif islam. Imang Mansur Burhan mendefinisikan pemberdayaan umat atau masyarakat sebagai upaya membangkitkan potensi umat islam ke arah yang lebih baik, baik dalam kehidupan sosial, politik maupun ekonomi.⁴

Dengan demikian, pengembangan atau pemberdayaan masyarakat islam merupakan modal empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal sholeh (karya terbaik), dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. Sasaran individual yaitu setiap individu muslim, dengan orientasi sumber daya manusia. Sasaran komunal adalah kelompok atau komunitas muslim, dengan orientasi

³ Manchendarwaty Nanih dkk, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung : Remaja Rosdakarya 2001), 41.

⁴Manchendarwaty Nanih dkk, *Pengembangan Masyarakat Islam*, 42.

pengembangan sistem masyarakat, sedangkan untuk sasaran institusional adalah organisasi islam dan pranata sosial kehidupan, dengan orientasi pengembangan kaulitas dan islamitas kelembagaan.⁵

Istilah keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu-individu lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan memberdayakan masyarakat adalah memperkuat unsur-unsur masyarakat keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dan memandirikan masyarakat.⁶

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.⁷

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat

⁵ Manchendarwaty Nanih dkk, *Pengembangan Masyarakat Islam*, 43.

⁶ Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, (Bandung : alfabeta, 2007), 01.

⁷ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, cet 1, (Yogyakarta : BPFE, 2000), 263.

hal, yaitu akses sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.⁸

Pemberdayaan sosial – ekonomi ialah usaha memberi pengetahuan, ketrampilan serta menumbuhkan kepercayaan diri serta kemauan kuat dalam diri seseorang sehingga mampu membangun suatu kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dengan kekuatan sendiri singkatnya pemberdayaan sosial – ekonomi bermaksud menciptakan manusia Swadaya dalam kegiatan sosial – ekonomi. Pemberdayaan sosial ekonomi pada intinya dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan antara lain pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan dan keterlibatan organisasi demi menumbuhkan dan memperkuat motivasi hidup dan usaha, serta pengembangan pengetahuan, keterampilan hidup dan kerja.⁹

C. Model Pemberdayaan Masyarakat

Jack Routhman menyusun dan merumuskan tiga model dalam praktek pemberdayaan masyarakat, yaitu : *locality development, social planning, dan sosial action*.

1. Model Pengembangan Lokal (*Locality Development Model*)

Model pengembangan lokal memasyarakatkan bahwa perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan secara bila melibatkan partisipasi aktif

⁸ Erna Erawati Cholitin dan Juni Thamrin, *Pemberdayaan Dan Refleksi Finansial Usaha Kecil Di Indonesia*, (Bandung : Yayasan Akita, 1997), 238.

⁹ Yayasan SPES, *Pengembangan Berkelanjutan*, (Jakarta : PT Pustaka, Pustaka Utama, 1992), 245.

yang luas disemua spektrum masyarakat tingkat lokal, baik dalam tahap penentuan tujuan maupun pelaksanaan tindakan perubahan. Pembangunan masyarakat adalah proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial – ekonomi yang lebih maju dan sehat bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi aktif mereka, serta berdasarkan kepercayaan yang penuh terhadap prakasa mereka sendiri.

2. Model Perencanaan Sosial (*Social Planning Model*)

Model ini menekankan proses pemecahan masalah secara teknis terhadap masalah sosial yang substantif, seperti kenakalan remaja, perumahan (pemukiman), kesehatan mental dan masalah sosial lainnya. Selain itu juga, model ini menganggap betapa pentingnya menggunakan cara perencanaan yang matang dan perubahan yang terkendali yakni untuk mencapai tujuan akhir secara rasional. Perencanaan dilakukan dengan sadar dan rasional, dalam pelaksanaannya juga dilakukan pengawasan-pengawasan yang ketat untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi.

3. Model Aksi Sosial (*Social Action Model*)

Model ini menekankan tentang betapa pentingnya penanganan kelompok penduduk yang tidak beruntung secara terorganisasi, terarah, dan sistematis. Juga, meningkatkan kebutuhan yang memadai bagi masyarakat yang lebih luas dalam rangka meningkatkan sumber atau perlakuan yang lebih sesuai dengan keadilan sosial dan demokrasi. Model ini bertujuan

mengadakan perubahan yang mendasar didalam lembaga utama atau kebiasaan masyarakat. Model aksi sosial ini menekankan pada pemerataan kekuasaan dan sumber-sumbernya, atau dalam hal pembuatan keputusan masyarakat dan mengubah dasar kebijakan organisasi-organisasi formal.¹⁰

D. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Konsep pemberdayaan masyarakat wacana pembangunan selalu dihubungkan dengan konsep sendiri, partisipasi jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya diletakkan pada kekuatan tingkat individu sosial dimana partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Orang –orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru yaitu dengan proses secara komulatif yang mengakibatkan pada pertumbuhan semakin banyak ketrampilan yang dimiliki seseorang sehingga semakin baik kemampuan berpartisipasinya.

Paradigma pembangunan holistik, yaitu pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi yang sangat memperhatikan aspek spasial, yaitu pembangunan berwawasan lingkungan, pembangunan berbasis komunitas, pembangunan berpusat pada rakyat, pembangunan berkelanjutan dan pembangunan berbasis kelembagaan. Untuk mewujudkan

¹⁰ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung : Humaniora Utama Press, 2010), 66-70.

pembangunan yang holistik tersebut diperlukan alternatif strategi, yaitu strategi yang berorientasi pada sumber daya atau *Resource Base Strategy (RBS)*, yang meliputi ketersediaan sumber daya, faktor keberhasilan serta proses belajar.

Pendekatan dalam RBS adalah strategi pengelolaan sumber daya yang berorientasi pada: kualitas, proses, kinerja, pengembangan, budaya, lingkungan (*management by process*) yang berdasarkan pada pembelajaran, kompetensi, keunggulan, berpikir sistematis, dan pengetahuan (*knowledge based management*).

Menurut Sumodiningrat konsep pemberdayaan secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Prekonomian rakyat adalah prekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat artinya prekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda prekonomian mereka sendiri. Secara garis besarnya adalah semua warga negara.
2. Pemberdayaan Ekonomi rakyat adalah semua usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan budaya saing yang tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena pada dasarnya yang menjadi kendala pengembangan ekonomi adalah strukturalnya. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi rakyat harus ada perombakan struktural atau perubahan struktural.

Dengan perubahan struktural maka, perubahan dari ekonomi tradisional dapat menjadi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang kuat, dari ekonomi subsistens ekonomi pasar, ketergantungan menjadi kemandirian yang mana langkah-langkah proses perubahan struktur antara lain:

- a) Pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya
 - b) Penguatan kelembagaan
 - c) Penguasaan teknologi
 - d) Pemberdayaan sumber daya manusia.
3. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktivitas, memberikan usaha yang sama kepada masyarakat dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, akan tetapi yang terpenting adalah adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

Dalam hal ini kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah :

1. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal)
2. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar perilaku rakyat bukan sekedar *price take*;
3. Pelayanan pendidikan kesehatan yang tercukupi
4. Penguatan industri kecil, seperti penggunaan mesin penggiling

5. Mendorong munculnya wirausaha baru dan melatih keterampilan sebagai dampak peduli rakyat oleh pemerintah
6. Pemerataan spasial.¹¹

Dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti :

1. Peningkatan akses bantuan modal
2. Peningkatan akses pengembangan masyarakat
3. Peningkatan akses sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

E. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum ada empat strategi pemberdayaan masyarakat antara lain :

1. *The Growth Strategy*

Penerapan strategi pertumbuhan pada umumnya yang dimaksudkan ialah untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis, melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktivitas, pertanian, permodalan, dan kesempatan kerja dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat, terutama dipedesaan.

Pada awalnya strategi ini dapat diterapkan dan dianggap *efektif* dalam pemberdayaan masyarakat, akan tetapi disebabkan bersifat *economic oriented* yang sementara kaidah hukum-hukum sosial dan moral terabaikan

¹¹ Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, 03.

sehingga yang terjadi adalah sebaliknya yaitu semakin melebarnya pemisah antara kaya dan miskin yang terjadi di daerah pedesaan yang berakibat pada terjadinya krisis ekonomi dan konflik sosial.

2. *The Welfare Strategy*

Strategi kesejahteraan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan. Akan tetapi, karena tidak dibarengi dengan pembangunan kultur dan budaya mandiri dalam diri masyarakat yang pada akhirnya yang terjadi adalah sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Jadi, dalam setiap pembangunan masyarakat salah satu aspek yang harus diperhatikan penganganannya adalah kultur dan budaya masyarakat. Pembangunan budaya jangan sampai kontra produktif dan pembangunan ekonomi yaitu dalam konteks yang sesuai dengan model pengembangan masyarakat menjadi sangat relevan sehingga terwujudnya masyarakat mandiri.

3. *The Responsitive Strategy*

Strategi merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi serta sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan.

Dalam pemberdayaan masyarakat sendiri belum pernah dilakukan maka strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat ini terlalu idealistik dan sulit ditransformasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, satu hal yang harus diperhatikan adalah kecapatan teknologi sering kali yang tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat dalam menerima dan memfungsikan teknologi itu sendiri yang berakibat pada penerapan strategi menjadi disfungsional.

4. *The Integrated Holistic Strategy*

Untuk mengatasi dilema pengembangan masyarakat karena “kegagalan” ketiga strategi yang dijelaskan diatas, maka konsep kombinasi dan unsur-unsur pokok dari etika strategi di atas menjadi alternatif terbaik karena secara sistematis mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang diperlukan yakni, ingin mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembanguan masyarakat.¹²

¹² Tjahya Supriana, *Strategi Pembangunan Dan Kemiskinan*, (jakarta : Rineka Cipta, 2001), 69-71.